



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Agustus 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOCHAMMAD AKBAR ANDI LELUASA
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 967098

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 9.650.000.000

1. Tanah Seluas 10135 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 1.300.000.000
2. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 6999 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 1.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , WARISAN Rp. 750.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/79 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 800.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 800.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 2.000.000.000
8. Tanah Seluas 4400 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 800.000.000
9. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 600.000.000
10. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA BANGKA, WARISAN Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 300.000.000



1. MOBIL, ALPHARD MINIBUS Tahun 2012, WARISAN Rp.
300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 259.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.750.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 10.236.250.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 10.236.250.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.